



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN



LAPORAN HASIL PELAKSANAAN UJI PETIK TRIWULAN 2 KOTAKU TAHUN 2019 OSP 10 PROV. SULAWESI TENGGARA



PT. CATURBINA GUNA PERSADA



PT. TRANS INTRA ASIA



PT. CATURBINA GUNA PERSADA



PT. TRANS INTRA ASIA
RESOURCES ENGINEERING, PLANNING & MANAGEMENT CONSULTANTS

LAPORAN UJI PETIK TRIWULAN-2 TAHUN 2019 OSP 10 PROV. SULTRA

A. PENDAHULUAN

A.1. Kemajuan Kegiatan KOTAKU

Lokasi KOTAKU provinsi Sulawesi Tenggara sesuai SK Kumuh tahun 2014 masing-masing Kota/Kabupaten seluas 619,57 Ha dan sampai akhir tahun 2018, capaian pengurangan kumuh komulatif mencapai 415.62 Ha atau sekitar 68%, sehingga sisa luas target 0 kumuh 2019 seluas 206.85 Ha (32%).

Khusus kegiatan KOTAKU lokasi BPM tahun 2019 sebanyak 27 Kelurahan yang tersebar pada 4 (empat) Kabupaten/Kota, progres sampai dengan periode pelaksanaan uji petik masih pada tataran tahap persiapan dan perencanaan. Hal ini didukung dengan data manual dari usk infrastruktur maupun capaian sesuai input SIM QS Android. Saat pelaksanaan uji petik yang belum tercapai tersisa *Penandatanganan SPK BKM dengan PPK* karena menunggu SK Satker PIP masing-masing Kabupaten/Kota. Namun demikian sesuai fakta lapangan saat uji petik masih ditemukan beberapa hal yang diperlukan peningkatan kualitas dokumen teknis.

Merujuk pada QS Android dan QS manual dari infrastruktur, progres tahap persiapan dan perencanaan untuk pelaksanaan BPM s019 sebagai berikut :

KEGIATAN	REALISASI TOTAL			
	BELUM (kel.)	PROSES (kel.)	SELESAI	
			(kel.)	(persen)
QS PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN SKALA LINGKUNGAN				
A. PERSIAPAN DAN PERENCANAAN				
1. Konsep Desain Penataan Lingkungan Permukiman (Siteplan)	0	0	27	100%
2. Seleksi Kegiatan Prioritas	0	0	27	100%
3. Konsultasi dan sosialisasi dengan Pemda/Instansi Terkait dan Masyarakat	0	0	27	100%
4. Identifikasi Dampak dan rencana pengelolaan	0	0	27	100%
5. Pemaketan pekerjaan	0	0	27	100%
6. Pembentukan KSM/panitia	0	0	27	100%
7. Pembentukan/ Revitalisasi KPP	0	0	27	100%
8. Survei teknis/lokasi	0	0	27	100%
9. Survei harga satuan Upah/material/alat	0	0	27	100%
10. Kesepakatan harga dan Swadaya	0	0	27	100%
11. Penyusunan DED,RAB,RKS dan jadwal	0	0	27	100%
12. Verifikasi oleh Askot infra	0	0	27	100%
13. Penandatanganan SPK BKM dengan PPK *)	26	0	1	3.70%
14. Pemberkasian Pencairan Tahp 1	0	0	27	100%
15. Penyusunan Rencana Kerja KSM	0	0	27	100%
16. Verifikasi Rencana Kerja KSM oleh Faskel teknik dan UPL	0	0	27	100%

Keterangan : *) = menunggu terbit SK satker

Sumber Data : QS Android update 04 Juli 2019 pkl : 16:00 wita

Sedangkan terkait dengan pemanfaatan DIPA-BPM 2019 di satker PIP pada 4 Kota/Kabupaten belum ada yang diproses di KPPN sebagai akibat dari keterlambatan terbit SK satker PIP. Sampai dengan Juli 2019 kegiatan yang dilaksanakan dalam

mendukung kesiapan pencairan BPM 2019 adalah memfasilitasi proses pemberkasan/ dokumen sampai pada tataran verifikasi OSP 10 Sultra, dengan gambaran progres sbb :

KEGIATAN	REALISASI TOTAL			
	BELUM (kel.)	PROSES (kel.)	SELESAI	
			(kel.)	(persen)
QS PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN SKALA LINGKUNGAN				
C. PENCAIRAN BPM TAHAP 1				
27. Pemberkasan Di Tingkat BKM	0	0	1	100%
28. Verifikasi Dok Pemberkadan Ditingkat Korkot / Askot	0	0	1	100%
29. Verifikasi Dok Pemberkadan Ditingkat OC / OSP	0	0	1	100%
30. Verifikasi Dok Pemberkadan Ditingkat Satker	0	1	0	0%
31. Penerbitan SPM	1	0	0	0%
32. Entri Kedalam Aplikasi Emon	1	0	0	0%
33. Penerbitan SP2D	1	0	0	0%
34. Entri SP2D Kedalam Aplikasi SP2D Online	1	0	0	0%

Page | 3

Sumber Data : QS Android update : 04 Juli 2019

Bila merujuk pada Master Schedule pelaksanaan BPM 2019, maka osp 10 sultra mengalami keterlambatan sekitar 5 – 6 bulan dimana seharusnya saat ini sudah persiapan untuk *pemberkasan dan pencairan dana BPM tahap 2* namun yang terjadi adalah sampai pencairan tahap-1 saja belum terlaksana.

Untuk itu dalam uji petik ini lebih difokuskan pada pemastian kesiapan seluruh dokumen yang diperlukan untuk pencairan BPM tahap 1 tahun 2019 terutama yang terkait dengan *Dokumen Perencanaan (Dok. Teknis), Dokumen Pemberkasan, Kelembagaan BKM/LKM, Kolaborasi, Skala Kawasan dan PKM*, termasuk diskusi terkait kesiapan BKM dan masyarakat bila terjadi kegiatan yang pelaksanaannya terpaksa harus paralel agar seluruh kegiatan tidak melewati tahun anggaran pemerintah.

A.2. Tujuan Uji Petik

- Melakukan pengamatan dan kajian apakah pelaksanaan kegiatan dari aspek waktu dan prosedur telah sesuai dengan rencana kerja dan pedoman, petunjuk pelaksanaan, Pedoman Operasional Baku (POS) atau ketentuan-ketentuan lainnya
- Mengamati kesesuaian kondisi riil dilapangan dengan data SIM; data kinerja dan kualitas serta persyaratan teknis yang telah ditetapkan
- Mengidentifikasi masalah-masalah yang timbul untuk secara cepat dan tepat dapat ditemukan pemecahannya (solusi)
- Melakukan pengamatan dan kajian hubungan/kaitan antara hasil pelaksanaan kegiatan dengan target/tujuan untuk mendapatkan informasi ukuran kemajuan (progres)
- Melakukan pengamatan dan penilaian apakah pola kerja dan manajemen yang diterapkan sudah tepat untuk mencapai target/tujuan program

A.3. REKAPITULASI LOKASI UJI PETIK LOKASI BPM 2019

Tabel 1 : Rekapitulasi Lokasi Uji Petik Lokasi BPM Triwulan 2 Tahun 2019 OSP 10 Sultra

Kode Prov	Nama Provinsi	Kode Kab	Nama Kab./Kota	Kode Kec	Nama Kec	Kode Kel	Nama Kel	Keterangan
74	Sulawesi Tenggara	7471	Kota Kendari	747107	Kendari	74710702	Jati Mekar	Uji Petik Mandiri
74	Sulawesi Tenggara	7471	Kota Kendari	747107	Kendari	74710708	Mata	Uji Petik Mandiri
74	Sulawesi Tenggara	7471	Kota Kendari	747107	Kendari	74710705	Kendari Caddi	KMP
74	Sulawesi Tenggara	7471	Kota Kendari	747108	Kendari Barat	74710808	Watu-Watu	Uji Petik Mandiri
74	Sulawesi Tenggara	7471	Kota Kendari	747108	Kendari Barat	74710805	Sanua	Uji Petik Mandiri
74	Sulawesi Tenggara	7471	Kota Kendari	747108	Kendari Barat	74710801	Benu-Benua	Uji Petik Mandiri
74	Sulawesi Tenggara	7471	Kota Kendari	747102	Abeli	74710203	Lapulu	Uji Petik Mandiri
74	Sulawesi Tenggara	7471	Kota Kendari	747102	Abeli	74710206	Talia	Uji Petik Mandiri
74	Sulawesi Tenggara	7471	Kota Kendari	747103	Mandongga	74710304	Korumba	Uji Petik Mandiri
74	Sulawesi Tenggara	7471	Kota Kendari	747110	Wua-Wua	74711008	Mataiwoi	Uji Petik Mandiri
74	Sulawesi Tenggara	7471	Kota Kendari	747101	Poasia	74710104	Anggoeya	Uji Petik Mandiri
74	Sulawesi Tenggara	7404	Kab Kolaka	740401	Kolaka	74040107	Tahoa	Uji Petik Mandiri
74	Sulawesi Tenggara	7404	Kab Kolaka	740401	Kolaka	74040102	Sabilambo	KMP
74	Sulawesi Tenggara	7404	Kab Kolaka	740402	Latambaga	74040205	Kolakaasi	Uji Petik Mandiri
74	Sulawesi Tenggara	7404	Kab Kolaka	740402	Latambaga	74040201	Sakuli	Uji Petik Mandiri
74	Sulawesi Tenggara	7404	Kab Kolaka	740402	Latambaga	74040206	S e a	Uji Petik Mandiri
74	Sulawesi Tenggara	7404	Kab Kolaka	740402	Latambaga	74040204	Mangolo	Uji Petik Mandiri
74	Sulawesi Tenggara	7402	Kab Muna	740202	Katobu	74020201	Butung-Butung	Uji Petik Mandiri
74	Sulawesi Tenggara	7472	Kota BauBau	7472010	Betoambari	74720101	Lipu	Kontrak Manajemen (perioritas)
74	Sulawesi Tenggara	7472	Kota BauBau	7472041	Lea-Lea	74720203	Kalia-lia	Uji Petik Mandiri
74	Sulawesi Tenggara	7472	Kota BauBau	7472040	Bungi	74720208	Waliabuku	Uji Petik Mandiri
74	Sulawesi Tenggara	7472	Kota BauBau	7472011	Murhum	74720401	Badia	Uji Petik Mandiri
74	Sulawesi Tenggara	7472	Kota BauBau	7472011	Murhum	74720405	Bone-Bone	Kontrak Manajemen (perioritas)
74	Sulawesi Tenggara	7472	Kota BauBau	7472011	Murhum	74720407	Wameo	Uji Petik Mandiri
74	Sulawesi Tenggara	7472	Kota BauBau	7472011	Murhum	74720409	Tarafu	Uji Petik Mandiri
74	Sulawesi Tenggara	7472	Kota BauBau	7472021	Kokalukuna	74720505	Waruruma	Kontrak Manajemen (perioritas)

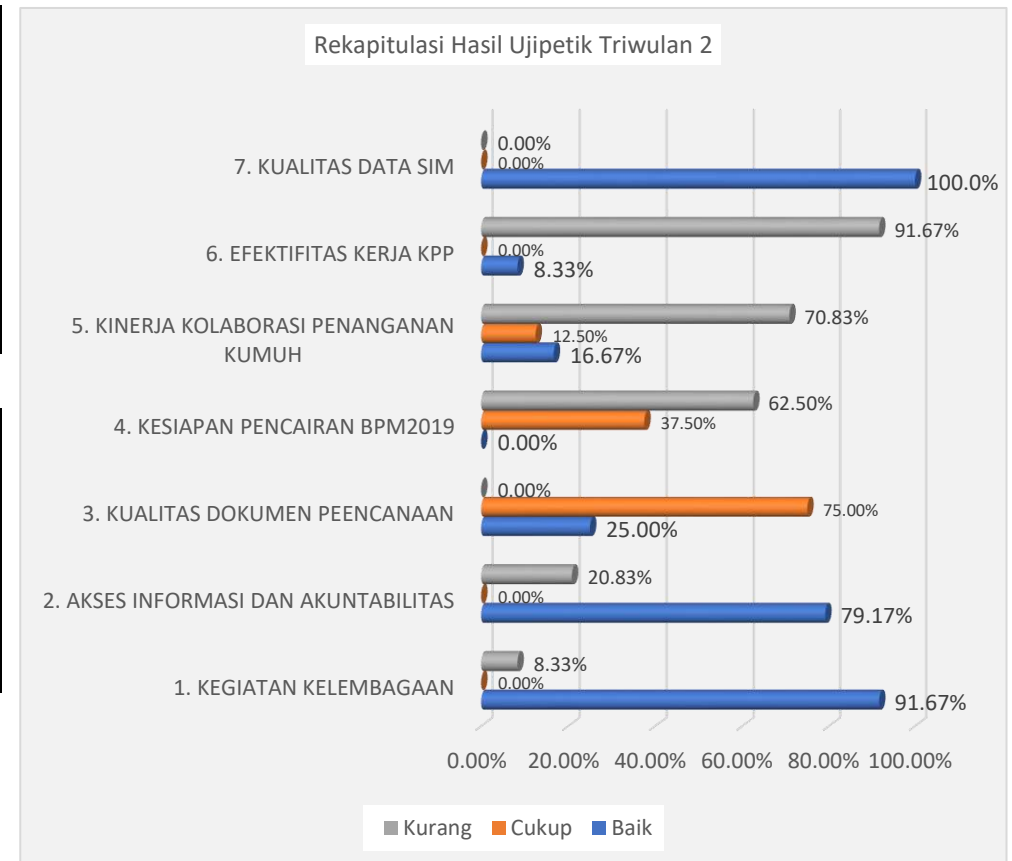
B. REVIEW CAPAIAN PELAKSANAAN KOTAKU

Seluruh data uji petik baik hasil wawancara, keberadaan dokumen dan fakta lapangan dilakukan analisa dan penilaian selanjutnya dientry dalam format rekap uji petik dan hasilnya sebagai berikut :

Tabel 2: Review Capaian Pelaksanaan Uji Petik

ASPEK	Baik	Cukup	Kurang
1. KEGIATAN KELEMBAGAAN	91.67%	0.00%	8.33%
2. AKSES INFORMASI DAN AKUNTABILITAS	79.17%	0.00%	20.83%
3. KUALITAS DOKUMEN PEENCANAAN	12.50%	83.33%	4.17%
4. KESIAPAN PENCAIRAN BPM2019	0.00%	37.50%	62.50%
5. KINERJA KOLABORASI PENANGANAN KUMUH	16.67%	12.50%	70.83%
6. EFEKTIFITAS KERJA KPP	8.33%	0.00%	91.67%
7. KUALITAS DATA SIM	100.0%	0.00%	0.00%

Aspek	Baik	Cukup	Kurang
1. KEGIATAN KELEMBAGAAN	22	0	2
2. AKSES INFORMASI DAN AKUNTABILITAS	19	0	5
3. KUALITAS DOKUMEN PEENCANAAN	6	18	0
4. KESIAPAN PENCAIRAN BPM2019	0	9	15
5. KINERJA KOLABORASI PENANGANAN KUMUH	4	3	17
6. EFEKTIFITAS KERJA KPP	2	0	22
7. KUALITAS DATA SIM	24	0	0



Tabel 3: Analisis Hasil Uji Petik Triwulan 2 Lokasi BPM 2019 OSP 10 Sultra

NO.	TOPIK	CAPAIAN KUANTITATIF	ISU/CATATAN LAPANGAN	FAKTOR PENYEBAB	REKOMENDASI
1	Kegiatan Kelembagaan BKM	Baik = 22 kel /91,67% Cukup : 0 kel/0% Kurang :2 ke/8,33%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagian besar BKM pada saat pelaksanaan uji petik sudah melakukan pemilu ulang (ada BA); kepengurusan berubah termasuk specimen bank; akte notaris dalam proses pencatatan 2. Kegiatan Audit kelembagaan telah dilakukan secara rutin setiap tahun; 3. Ketepatan waktu pemilu BKM yg habis periode kepengurusan sesuai AD ada beberapa yg belum tepat bila dihitung bulan namun tepat waktu bila hitung tahun 4. Partisipasi aktif anggota TIPP dalam pengendalian dan pengelolaan pengurangan kumuh belum mencapai 75% 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Kapasitas Masyarakat masih dominan sebatas menggugurkan kewajiban. Hal ini ditandai saat wawancara terkait item2 tertentu pemahaman masih sangat minim. Jadi PKM belum mampu meningkatkan pemahaman menuju kemandirian BKM 2. Pemahaman terkait legalitas BKM cukup baik termasuk pemahaman ttg tata cara dan mekanisme pencatatan ke Notaris cukup baik, hanya waktu dari pihak notaris yang terbatas sehingga msh dalm proses 3. Pemahaman tentang penyebab kekumuhan belum tuntas/fokus pada tanggung jwb bersama, msh tergantung pada BPM, TIPP belum berperan secara aktif 	Pelatihan TIPP dan BKM harus lebih fokus pada tupoksi khusus pengurangan kumuh.
2	Akses Informasi dan Akuntabilitas	Baik = 19 kel /79,17% Cukup : 0 kel/0% Kurang :5 ke/20,83%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebahagian sudah memiliki buku pengaduan namun pengelolaannya masih belum maksimal, BKM sudah terlibat aktif dalam menyelesaikan pengaduan namun masih lemah pengadminstrasian 2. Sarana/media yang digunakan masih dominan tatap muka langsung berupa pertanyaan 3. RWT sudah terlembaga sehingga setiap akhir tahun rata2 melaksanakan RWT tersebut 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Papan informasi sudah tidak ada pada beberapa BKM, Kotak pengaduan hanya sebagai aksesoris sekteratit BKM 2. PIM belum masuk dalam materi wajib dlm PKM, sehingga terkesan terabaikan 3. Keterlibatan TF dalam pengadministrasian PIM masih terkesan tinggi 4. Tindaklanjuti PIM terkesan hanya sebatas adminitrasi saja, belum menjadi rujukan kegiatan selanjutnya (perbaikan) 	Materi PKM perlu ditambahkan pengenalan kembali sarana/media PIM termasuk substansi keberadaan PIM dalam KOTAKU

NO.	TOPIK	CAPAIAN KUANTITATIF	ISU/CATATAN LAPANGAN	FAKTOR PENYEBAB	REKOMENDASI
			4. Sosialisasi rencana kegiatan infrastruktur 2019 masih perlu ditingkatkan sehingga seluruh warga mengetahui lokasi termasuk alasan pemilihan lokasi kegiatan		
3	Kualitas dokumen perencanaan teknis	Baik = 6 kel /25% Cukup=18 kel/75% Kurang=0	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemaketan pekerjaan sudah sesuai POS infrastruktur 2019; Dokumen perencanaan terutama legalitas lahan masih perlu dilengkapi 2. Konsep desain masih perlu dikembangkan karena dalam pra desain yang ada belum menunjukkan perubahan wajah permukiman yang sifatnya solutif jangka panjang 3. Penyusunan jadwal kegiatan KSM/panitia pelaksana sudah baik 4. Penentuan outcome terutama yang berkontribusi besar pada pengurangan kumuh perlu dioptimalkan lagi 5. Masih ditemukan beberapa Dokumen termasuk RAB yang belum diverifikasi askot dan satker 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemilik lahan lokasi pembangunan infrastruktur cukup banyak dan bermukim ditempat lain sehingga berdampak pada pemenuhan administrasi legalitas lahan • Legalitas (SK) Satker belum terbit sehingga verifikasi dokumen dan RAB belum dilakukan • Update baseline belum dilakuakn sehingga outcome kegiatan dalam data baseline masih belum sesuai dengan kondisi riil lapangan (proteksi kebakaran) • Safeguard masih belum dilengkapi dengan Berita Acara atau ijin sehingga kegiatan masih belum fix khususnya lahan yang masih lahan produktif 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KBIK internal Tim Korkot harus lebih dimaksimalkan baik waktu maupun fokus materinya perlu di perdalam (konsep pra desain, tema merubah wajah kawasan, infrastruktur for all ▪ Askot infra berkolaborasi dengan askot UP harus lebih intens melakukan bimbingan dalam penyusunan proposal sesuai ketentuan POS infrastruktur 2019
4	Kesiapan Pencairan BPM 2019	Baik = 0 Cukup=9 kel/37,50% Kurang=15/62,50%	<ul style="list-style-type: none"> • Kelengkapan dokumen pemeberkas dan pencairan sudah siap mulai tataran BKM sampai Verifikasi Korkot/OSP, 	<ul style="list-style-type: none"> • Keterlambatan penerbitas SK Satker PIP kabupaten/kota sehingga berdampak pada terhambatnya seluruh proses 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Korkot harus lebih intens berkonsultasi dengan tim satker terkait beberapa dokumen terutama

NO.	TOPIK	CAPAIAN KUANTITATIF	ISU/CATATAN LAPANGAN	FAKTOR PENYEBAB	REKOMENDASI
			<p>namun verifikasi Satker, SPK dan tangan Satker/PPK belum ada</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belum ada persiapan tim satker terkait dengan rekon Aplikasi SPM oleh PPK ke KPPN • Legalitas hukum/formal pengukung dokumen penanganan dampak lingkungan dan sosial (Berita Acara/Surat Hibah atau ijin penggunaan lahan dll) sebahagian belum lengkap 	<p>persiapan perncairan mulai tingkat Satker sampai pada tingkat KPPN</p>	<p>dokumen teknis agar saat terbit SK sudah ready semuanya</p> <p>2. OSP lebih intens melakukan komunikasi dengan pusat/KMP</p>
5	Kinerja Pelaksanaan Kolaborasi Penanganan Kumuh	<p>Baik =4 Kel/16,67%</p> <p>Cukup=3 kel/12,50%</p> <p>Kurang=17 Kel/70,83%</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kolaborasi perencanaan, pelaksanaan dan penganggaran masih belum berjalan efektif, Forum kolaborasi secara formal sudah ada hanya tidak lebih dari adanya tuntutan kebutuhan program (Belum ada aksi nyata yang dapat berkesinambungan) • Pengurangan kumuh basis SIM belum nampak (masih capaian BDI) • Secara spesifik, Kolaborasi belum tercantum secara mengikat dalam dokumen teknis kegiatan 2019 • Pertemuan pokja provinsi dan kabupaten/kota untuk membahas strategi kolaborasi penanganan kumuh belum terlihat melembaga bahkan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengalaman dan contoh nyata yang dapat menjadi rujukan lokal tentang keberhasilan kolaborasi dalam pengurangan kumuh belum nampak di kelurahan yang difasilitasi, sehingga pendampingan/advokasi terkesan sebatas himbauan dan wacana 2. Inovasi2 kolaborasi belum tumbuh pada semua level terutama (Lurah & BKM). Ketergantungan pada anggaran dari pusat masih sangat tinggi 3. Dokumen perencanaan yang ada di BKM belum layak jual sehingga ketertarikan stakeholder untuk berkolaborasi sangat rendah 4. Kelembagaan pokja PKP terkesan hanya sebatas organ formalitas program, sehingga keberadaannya belum memberikan kontribusi positif 	<ol style="list-style-type: none"> 1. OSP melalui USK FIC harus melakukan terobosan baru (out off the box), dimulai dari Pokja Provinsi (melakukan pertemuan formal) untuk menetapkan strategi kolaborasi dalam pengurangan kumuh kemudian dilanjutkan pada Pokja Kab/Kota; 2. Pemda melalui Pokja PKP melaksanakan kegiatan pelatihan khusus terkait Kolaborasi dan target pencapaian KPI

NO.	TOPIK	CAPAIAN KUANTITATIF	ISU/CATATAN LAPANGAN	FAKTOR PENYEBAB	REKOMENDASI
			cenderung kurang. Kegiatan lebih dominan oleh inisiatif dari konsultan itupun sebatas identifikasi kegiatan –kegiatan yang perlu di kolaborasikan		
6	Efektifitas kerja KPP	Baik =2 Kel/8,33% Cukup=0 Kurang=22 Kel/91,67%	<ul style="list-style-type: none"> KPP sudah terbentuk tetapi sebatas administasi; Pemahaman cukup baik; Rencana Kerja Belum ada; Sumber pendanaan yang tidak ada; namun demikian investasi tetap terpelihara 	<ul style="list-style-type: none"> KPP terkesan hanya menjadi kebutuhan program bukan menjadi kebutuhan masyarakat sehingga operasional sangat susah (dana swadaya sangat minim) PKM yang dilakukan selama ini masih belum menumbuhkan kesadaran kolektif warga hal ini dibuktikan dengan kesadaran masyarakat masih rendah, gotong royong mulai luntur, kepekaan mulai luntur misal sarana yang telah terbangun dibiarkan begitu saja bila tersumbat dan kotor dll 	Peningkatan kapasitas KPP harus berorientasi penyadaran untuk menumbuhkan kepedulian dan kepekaan
7	Kualitas data SIM	Baik =24 Kel/100% Cukup=0 Kurang=0	<ul style="list-style-type: none"> Secara rata-rata semua data lapangan tergambar dalam Data SIM, hanya bila dipilah peritem pekerjaan masih ada yang belum ada dalam SIM, seperti forum kolaborasi belum terlihat dalam SIM; R0 pengurangankumuh dan SIM belum sama. Dari segi kelembagaan, semua proses dan output sudah terinput dalam SIM. 	<ol style="list-style-type: none"> SIM belum menjadi kebutuhan all Tim faskel (jarang membuka web) sehingga kontrol capaian KPI terutama outcome dan output basis sim sangat rendah SIM belum dijadikan materi pokok dalam KBIK tim korkot; KBIK lebih banyak bicara progres basis manual, bahkan terkesan hari SIM sudah jarang dilakukan serta Laporan bulanan korkot dan TF measih lemah dalam analisa data SIM 	Penguatan khusus tentang teknis dan analisa data SIM